

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi Beragama

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama adalah sistem yang mengatur tata cara keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berkaitan dengan hubungan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dengan agama membuat pemeluknya lebih terarah dalam kehidupan pribadi dan sosialnya, karena pada dasarnya agama mengajarkan kebaikan bagi penganutnya.¹

Agama yang ada di Indonesia jumlahnya cukup banyak, tetapi yang disebut secara formal hanya enam saja, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Pengakuan terhadap agama tersebut secara yuridis tertuang dalam PNPS Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 1. Namun bukan berarti agama dan kepercayaan lain, misalnya Yahudi, Zaratustrian, Shinto dan Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan

¹ Diambil dari <https://kbbi.web.id/agama>, diunduh pada hari Selasa, 2 November 2021

dibiarkan adanya, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut atau peraturan perundangan lain.²

Terdapat agama yang lebih dahulu ada di Nusantara sebelum agama tersebut berkembang di Indonesia, yang biasanya disebut dengan kepercayaan asli Nusantara. Diantaranya adalah *Sunda Wiwitan* yang dianut oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak Banten. *Sunda Wiwitan* aliran *Madrais*, yang juga dikenal sebagai agama *Cigugur* (dan ada beberapa penamaan lainnya) di Cigugur, Kuningan Jawa Barat. Ada juga agama *Buhun* di Jawa Barat, *Kejawen* di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian, agama *Parmalim*, yakni agama asli dari Batak di Sumatera Utara, agama *Kaharingan* di Kalimantan, kepercayaan *Tonaas Walian* di Minahasa Sulawesi Utara, *Tolottang* di Sulawesi Selatan, *Wetu Telu* di Lombok, *Naurus* di Pulau Seram Maluku. Agama-agama asli Nusantara ini didegradasi sebagai animisme, penyembah berhala atau dipandang sebagai aliran kepercayaan.³

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. pengurangan kekerasan, dan 2. penghindaran keekstreman.

² Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1979), hlm. 83.

³ K. M. Suhardana, *Panca Sraddha: Lima Keyakinan Umat Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2009), hlm. 9-10.

Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *care* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki persamaan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Bahkan kata *wasith* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata ”wasit” yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan.

Kementerian RI mengemukakan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Menurut Lukman Hakim Saifuddin moderasi beragama merupakan proses memahami serta mengamalkan ajaran agama dengan adil dan seimbang, agar dapat terhindar dari perilaku yang ekstrem atau berlebihan saat mengimplementasikannya. Cara pandang

dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat multikultural seperti Indonesia, karena dengan cara tersebut keragaman disikapi dengan bijak, serta toleransi dan keadilan dapat terwujud.⁴

Moderasi beragama menurut M. Quraish Shihab adalah moderasi (*wasathiyah*) bukanlah sikap yang bersifat tidak jelas atau tidak tegas terhadap sesuatu seperti sikap netral yang pasif, bukan juga pertengahan matematis. Moderasi beragama bukan sekedar urusan perorangan, melainkan juga urusan setiap kelompok, masyarakat, dan negara. Moderasi beragama menurut Ali Muhammad Ash Shallabi, *wasathiyah* (moderasi) adalah hubungan yang melekat antara makna *khairiyah* dan *baniyah* baik yang bersifat inderawi dan maknawi.⁵

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, moderasi beragama adalah cara pandang dan cara kita bersikap adil dan berimbang dalam menghargai dan menyikapi perbedaan keberagaman agama, serta perbedaan ras, suku, budaya, adat istiadat, dan etis agar kesatuan antar umat beragama tetap terjaga serta dapat memelihara kesatuan negara.

2. Prinsip Dasar Moderasi Beragama

Prinsip dasar moderasi adalah adil dan berimbang. Salah satu prinsip dasar moderasi beragama yaitu selalu menjaga keseimbangan

⁴ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 17.

⁵ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Wasathiyah Dalam Al-Qur'an Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 41.

di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, kepentingan individual dan kemaslahatan umum, antara keharusan dan kesukarelaan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Prinsip yang pertama adalah adil, dalam KBBI kata “adil” memiliki arti:

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak
- b. Berpihak pada kebenaran
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang

Secara bahasa, keadilan lebih sering disebut dengan istilah *itidal* yang artinya lurus dan tegas, maksudnya yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban secara proporsional. Kata adil tidak bisa dipisahkan dari arti “sama” yaitu persamaan dalam hak. Dalam hal ini, persamaan akan melahirkan bagi setiap individu, sehingga tidak memiliki kecenderungan untuk memihak pada yang lainnya. Prinsip keseimbangan dapat diartikan sebagai “tidak berkekurangan dan tidak berlebihan”, tetapi pada saat yang bersamaan, prinsip tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sikap menghindar dari situasi sukar atau sikap melarikan diri dari tanggung jawab.⁶

Prinsip yang kedua, keseimbangan, yaitu istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan bersikap

⁶ Ali Muhtarom dkk, *Moderasi Beragama (Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren)*, (Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020) hlm.40-41

seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka bersikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak pada keadilan, hanya saja keberpihakannya tidak sampai merampas hak orang lain yang dapat berakibat merugikan.⁷

3. Indikator Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan pemahaman keagamaan yang mengambil posisi di tengah, tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dalam konteks Islam *wasathiyah*, pemahaman ini mengandung prinsip keagamaan yang mengarah pada upaya untuk mengatur kehidupan secara seimbang. Keseimbangan menjadi sangat penting untuk dipahami oleh setiap muslim dalam mengamalkan ajaran Islam. Pemahaman Islam yang seimbang seseorang tidak akan cenderung pada suasana batin keimanan yang emosional. Ketika sikap keagamaan ditunjukkan dengan ekspresi kemarahan, akan mudah ditebak bahwa seseorang telah dikuasai oleh nafsu amarahnya.

Pada dasarnya moderasi beragama mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam keagamaan, maka akan terlihat indikatornya ketika paham keagamaan tersebut searah dengan penerimaannya terhadap nilai-nilai, budaya, dan kebangsaan. Pemahaman keagamaan ini lebih mengedepankan pada sikap toleransi untuk terwujudnya kedamaian bangsa dan negara.⁸

⁷ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 19

⁸ Aceng Abdul Aziz dkk, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta Pusat: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 16

Berikut ini merupakan empat hal yang menjadi indikator moderasi beragama yaitu:⁹

a. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan menjadi indikator yang sangat penting terutama ketika dikaitkan dengan munculnya paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodif terhadap nilai-nilai dan budaya yang sejak dulu sudah terpatri sebagai identitas kebangsaan yang luhur. Kemunculan paham keagamaan tersebut akan mengarah pada sikap mempertentangkan antara ajaran agama dengan budaya karena ajaran agama seolah-olah menjadi musuhnya budaya. Pemahaman keagamaan ini kurang adaptif karena sejatinya ajaran agama merupakan semangat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa.

Pada saat ini, persoalan komitmen kebangsaan juga sangat penting untuk diperhatikan ketika muncul pemahaman baru keagamaan yang bersifat transnasional yang bertujuan mewujudkan cita-cita pembentukan sistem negara yang tidak mau bertumpu pada konsep negara yang berbasis bangsa, karena ingin mendirikan sistem kepemimpinan yang enggan mengakui kedaulatan bangsa. Ketika paham tersebut bermunculan di tengah masyarakat, maka akan mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus

⁹ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 42

diletakkan dalam konsep keseimbangan. Dalam hal ini indikator moderasi beragama dapat dilihat dari komitmen pemahaman keagamaan seseorang yang sekaligus dikemas dalam bingkai kebangsaan. Segala bentuk paham keagamaan yang memiliki ideologi untuk menjauhkan individu maupun kelompok masyarakat dari komitmen kebangsaan dengan tujuan mendirikan negara sendiri di luar sistem NKRI dianggap tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama.

b. Toleransi

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Urgensi dari toleransi adalah sikap saling terbuka. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang lain, serta menunjukkan perilaku yang positif.

Dalam demokrasi, toleransi menjadi fondasi terpenting sebagai sikap dalam menghadapi berbagai perbedaan. Demokrasi akan terlaksana dengan baik ketika masyarakat mampu mengendalikan kehendak sendiri dan menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi sebuah bangsa, dapat diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa tersebut.

Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Perspektif toleransi sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan keyakinan agama, namun bisa mengarah pada perbedaan bahasa daerah, ras, suku, budaya, dan lain sebagainya.

c. Anti Kekerasan

Munculnya radikalisme atau kekerasan dalam konteks moderasi beragama merupakan akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap yang muncul dari ide atau gagasan dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kekerasan dari sikap keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga kekerasan secara verbal.

Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap seseorang atau masyarakat yang menggunakan cara kekerasan dalam membawa perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam waktu yang singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme biasanya dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal akan melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror orang-orang yang berbeda pemahaman dengan mereka. Meskipun radikalisme

sering dikaitkan dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme bisa berkaitan dengan semua agama.

Adanya radikalisme dikarenakan persepsi ketidakadilan yang dialami individu atau sekelompok orang. Persepsi tersebut akan melahirkan radikalisme jika dikelola secara ideologis dengan kebencian terhadap kelompok yang dianggap tidak adil dan mengancam identitasnya. Maka dari itu, indikator moderasi beragama yang berhubungan dengan paham radikalisme terletak pada sikap keagamaan yang seimbang dan adil. Sikap keagamaan yang mengutamakan keadilan, saling menghormati dan memahami perbedaan di tengah masyarakat.

d. Akomodatif terhadap Kebudayaan Lokal

Praktik dan perilaku keagamaan yang akomodatif terhadap kebudayaan lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan menerima amalan keagamaan yang mendukung kebudayaan lokal dan tradisi. Seseorang yang moderat cenderung lebih ramah untuk menerima budaya lokal dan tradisi dalam perilaku keagamaannya, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tradisi keagamaan yang adaptif ditandai dengan kemauan untuk menerima perilaku beragama yang tidak hanya menekankan pada norma yang berlaku, melainkan juga menyesuaikan lingkungan dan situasi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, ada kelompok yang tidak

akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan sebuah tradisi dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang merusak keaslian agama.

Namun praktik keberagaman ini tidak bisa serta merta menggambarkan moderasi seseorang. Hal ini hanya bisa digunakan untuk sekadar melihat kecenderungan secara umum. Masih harus dibuktikan mengenai pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal, akan semakin moderat dalam beragama. Bisa saja, tidak ada hubungan positif antara sikap moderat dengan akomodatif terhadap kebudayaan lokal dalam beragama.

B. Implementasi Moderasi Beragama di Masyarakat

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, etnis, budaya, bahasa, dan agama. Keragaman tersebut saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, keragaman yang ada di Indonesia sering kali menimbulkan berbagai konflik yang berujung pada tindakan kekerasan atau ekstrem. Maka dari itu perlu adanya moderasi beragama sebagai penengah diantara keberagaman sehingga penganut agama dapat mengambil jalan tengah (moderat) dalam keragaman tafsir, bersikap toleransi namun tetap berpegang teguh pada hakikat ajaran agamanya.¹⁰

¹⁰ Eldelweisia Cristiana, "Implementasi Moderasi Beragama dalam Mencegah Radikalisme", Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP, (No.7, Tahun 2021), 21.

Dalam mengatasi sebuah permasalahan, moderasi beragama berusaha melakukan pendekatan secara kompromi dengan tetap berada di tengah diantara perbedaan atau permasalahan tersebut. Upaya untuk dapat mengimplementasikan atau menerapkan moderasi beragama yaitu dengan sikap toleransi, saling menghargai, dan saling meyakini kepercayaan masing-masing agama, tanpa merasa paling benar satu sama lain. Selain itu dalam bermasyarakat harus mengedepankan keterbukaan terhadap perbedaan dan asas persaudaraan bukan hanya keagamaan dan kenegaraan. Sehingga pada posisi inilah keduanya akan bertemu dan mencapai titik tengah dimana moderasi itu berada.

Moderasi beragama bukan berarti tidak memiliki pegangan kebenaran dengan melebur dan mencampuradukkan kebenaran atau menghilangkan jati diri masing-masing kelompok. Tetapi lebih mengutamakan keterbukaan bahwa dalam kehidupan masyarakat khususnya di desa terdapat pendapat, pemahaman atau keyakinan yang berbeda dan memiliki kesamaan hak untuk dihormati, dihargai dan diakui dalam kebersamaan. Oleh karena itu penerapan moderasi beragama di masyarakat sangat penting untuk menjaga kerukunan, sehingga tidak terjadi konflik antar individu maupun kelompok.

Ada tiga hal yang menjadi urgensi diperlukannya moderasi beragama yaitu: Pertama, hakikat dari kehadiran agama adalah untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, termasuk menjaga nyawanya. Semua agama membawa misi kedamaian dan

keselamatan. Untuk mencapai prinsip tersebut, agama menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam aspek kehidupan; agama mengajarkan bahwa menjaga nyawa sesama manusia merupakan prioritas atau utama; menghilangkan satu nyawa sama saja dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia.¹¹

Kedua, dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, agama pun berkembang dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karya dan tulisan pemuka agama terdahulu juga mengalami perkembangan penafsiran terutama yang berhubungan dengan kompleksitas kemanusiaan. Bahkan sekarang teks-teks agama mengalami multitafsir, menyebabkan penguasaan dalam menafsirkan kebenaran sehingga sebagian dari pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran menurut versi yang dikehendakinya. Maka konflik pun menjadi tidak dapat terelakkan. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah oleh konflik yang berlatar agama.

Ketiga, dalam konteks Indonesia, perlunya moderasi agama yaitu sebagai salah satu strategi dalam mempertahankan dan memperkuat prinsip kebhagnsaan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, sebagai bangsa yang beragam dengan segala kemajemukan namun tetap berlandaskan Pancasila yang merupakan dasar negara yang menyatukan seluruh bangsa

¹¹ Eldelweisia Cristiana, "Implementasi Moderasi Beragama dalam Mencegah Radikalisme", Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP, (No.7, Tahun 2021), 25-26.

dari Sabang sampai Merauke dengan beragam kelompok etnis, budaya dan agama.

C. Sikap Masyarakat Terhadap Moderasi Beragama

Dalam upaya untuk menerapkan moderasi beragama di kehidupan sehari-hari, diperlukan pemahaman mengenai sikap yang harus ditunjukkan oleh seseorang dilingkup masyarakat. Sikap pada umumnya diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu sebagai bentuk tanggapan atau respon pada suatu hal. Sikap merupakan reaksi atau respon yang muncul dari seseorang terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara tertentu.¹² Sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh individu terhadap suatu objek. Objek tersebut dapat berupa benda, manusia atau informasi.¹³

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat dipahami bahwa sikap adalah reaksi atau respon berupa penilaian yang muncul dari seseorang terhadap suatu objek. Sikap dapat dikatakan sebagai perwujudan adanya kesadaran terhadap lingkungannya.

Sikap dapat juga diartikan sebagai pikiran dan perasaan yang mendorong manusia bertindak laku ketika menyukai sesuatu. Sikap seorang individu perlu untuk diketahui arahnya, negatif atau positif. Dengan cara melihat dari komponen-komponen sikap yang muncul dari seseorang. Sikap merupakan suatu konsep yang dibentuk oleh tiga

¹² Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 3.

¹³ Eko A. Meinarno dan Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humainika, 2009), hlm 151.

komponen yaitu kognitif, afektif dan konatif. Komponen kognitif berisi pemikiran atau ide yang berhubungan dengan objek sikap, misalnya penilaian, keyakinan, kesan, atribusi, dan tanggapan mengenai objek sikap. Komponen afektif adalah komponen yang meliputi perasaan atau emosi dari seseorang terhadap objek sikap. Komponen afektif pada sikap individu dapat dilihat dari perasaan suka, tidak suka, senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Sedangkan komponen konatif, dapat dilihat melalui respon subjek berupa tindakan yang dapat diamati.¹⁴

Sedangkan pengertian masyarakat yaitu sejumlah manusia merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan memiliki kepentingan yang sama. Seperti sekolah, keluarga, perkumpulan, negara semua adalah masyarakat. Arti lain dari masyarakat juga merupakan salah satu dari satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia. Istilah dalam bahasa Inggris yaitu *society*, sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab *syakara* yang artinya ikut serta atau partisipasi, kata Arab masyarakat berarti saling bergaul atau istilah ilmiahnya berinteraksi.¹⁵

Masyarakat menurut M.J. Herskovits, merupakan kelompok individu yang diorganisasikan, dengan mengikuti cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengemukakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, sikap, tradisi, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan

¹⁴ Eko A. Meinarno dan Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial*, hlm 154.

¹⁵ Gunsu Nurmansyah dkk, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, (Bandar Lampung: Aura Publisher, 2019), hlm. 46.

batasan tentang masyarakat sebagai kelompok manusia terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai hubungan erat dan teratur.¹⁶

Menurut Soerjono Seakanto, masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup berkelompok. Kelompok inilah yang nantinya membentuk suatu masyarakat. Mereka saling mengenali dan saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Kesatuan sosial merupakan perwujudan dalam hubungan sesama manusia. Seorang tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa ada manusia lain. Manusia maupun makhluk hidup lain yang hidup bersama individu sejenisnya hidup dalam suatu kelompok.
- b. Melahirkan kebudayaan. Dalam konsepnya, tidak ada masyarakat tidak ada kebudayaan, begitu sebaliknya. Masyarakat yang akan melahirkan budaya dan budaya itu diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan proses penyesuaian. Adanya kebudayaan dalam masyarakat merupakan satu dukungan yang besar bagi setiap individu dalam beberapa perspektif.
- c. Mengalami perubahan. Suatu perubahan yang terjadi karena faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Setiap unsur di masyarakat mengalami perubahan, contohnya perubahan sosial dapat meliputi perubahan nilai-nilai, norma, teknologi, dan interaksi sosial.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm 137.

- d. Manusia yang berinteraksi. Terlihat bahwa dalam masyarakat, terdapat individu yang saling berinteraksi, saling bergaul membentuk entitas sosial yang hidup. Banyak sarana dan prasarana yang menjalin interaksi dan kontak sosial antar individu, yang cakupannya tidak sebatas keluarga melainkan lebih luas yakni pada ranah hubungan internasional.
- e. Terdapat kepemimpinan. Dalam hal ini, pemimpin terdiri dari ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan lain sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto, kepemimpinan adalah kemampuan memimpin untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikutnya. Sehingga orang lain bertindak laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.
- f. Adanya stratifikasi sosial. Istilah stratifikasi berasal dari kata *strata* dan *stratum* berarti lapisan. Oleh karena itu stratifikasi sosial sering diartikan dengan pelapisan masyarakat. Stratifikasi sosial yaitu sistem pembeda individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menempatkan pada kelas-kelas sosial yang berbeda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya.

Jadi, sikap masyarakat merupakan pikiran dan perasaan yang mendorong untuk bertindak laku dalam berinteraksi sosial. Sikap tersebut bisa saja positif atau negatif tergantung pada respon masing-masing individu dalam bermasyarakat. Pada penerapan moderasi beragama sangat penting adanya pemahaman mengenai sikap yang seharusnya dilakukan

dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakat dapat bersikap positif untuk menyikapi perbedaan dalam beragama. Karena sikap tersebut yang dapat mewujudkan kerukunan dan kedamaian di setiap lapisan masyarakat.